**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1 LATAR BELAKANG**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut Biro Humas) merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran Biro Humas Tahun Anggaran 2018.

Dokumen Renja Biro Humas Tahun 2018 ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Humas pada Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Biro Humas yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas Tahun 2016-2021 untuk menunjang Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Untuk menjamin kesinambungan perencanaan, seluruh rencana kerja yang terkandung dalam Renja ini disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Biro Humas Tahun 2018, Renstra Biro Humas Tahun 2016-2021, dan Renja Kementerian/Lembaga yang terkait erat dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas. Dengan demikian, Dokumen Renja Biro Humas 2018 ini merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak dapat dipisahkan dengan RKPD Biro Humas Tahun 2018, Renstra Biro Humas 2016-2021, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

**I.2 LANDASAN HUKUM**

Dokumen Renja Biro Humas Tahun 2018 ini disusun merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permenkominfo Nomor 17/P/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/Permen/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/Per/M.Kominfo/b/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Infrastruktur Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
25. Kesepakatan bersama bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 41 tahun 2007, Nomor 373/M.Kominfo/08/2007, Nomor KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah.
26. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 100/Kep/M.Kominfo/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah
27. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371/Kep/M.Koinfo/08/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah
28. Keputusan Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi No 01/Kep/ DISKDI/11/2005 tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;
34. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
36. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

**I.3.1 Maksud**

Renja Biro Humas 2018 dimaksudkan sebagai derivasi rencana tahun ke-3 dari Renstra Biro Humas 2016-2021 yang dijadikan acuanpelaksanaan kegiatan-kegiatan dan anggaran Biro Humas dalam rentang waktu satu tahun terhitung sejak 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018.

**I.3.2 Tujuan**

1. Mendeskripsikan program prioritas, program pendukung, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Humas pada Tahun Anggaran 2018 untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Biro Humas yang tertuang dalam Renstra Biro Humas Tahun 2016-2021;
2. Pedoman ukur capaian kinerja Biro Humas Tahun 2018sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

**I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Demi koherensi dan konstruksi agar mudah dipahami, Renja Biro Humas Tahun 2017 disajikan dengan membagi pembahasan ke dalam 4 (empat) Bab dimana masing-masing Bab mengandung substansi, sebagai berikut:

* Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari; Latar Belakang penyusunan Renja Biro Humas Tahun 2018, Landasan Hukum yang menggariskan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Biro Humas, Uraian mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renja Biro Humas 2018, dan Sistematika Penulisan Renja Biro Humas Tahun 2018;
* Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, yang terdiri dari; Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Humas Tahun 2016 dan Capaian Renstra Biro Humas Tahun 2016-2021, Analisis Kinerja Pelayanan Biro Humas, Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas; Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Telaahan atas Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat;
* Bab III Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan, yang terdiri dari; Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Biro Humas Tahun 2018, dan Program dan Kegiatan Biro Humas Tahun 2018;
* Bab IV Penutup, yang berisikan sari dari tiga Bab sebelumnya serta uraian mengenai aspek-aspek yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Biro Humas Tahun 2018.

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

**II.1.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN RENJA BIRO HUMAS TAHUN 2016**

Di tahun ini, Biro Humas melaksanakan 8 Program dan 38 Kegiatan dengan total Anggaran sebesar **Rp 9.141.973.000,-** Pada APBD Perubahan 2016, Biro Humas mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian didistribusikan pada 10 (sepuluh) kegiatan;Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Pengadaan Meubeleur,Pengadaan Komputer, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD, Pengelola Pelayanan Informasi Publik, Liputan, Penyebarluasan Pembangunan Media Cetak, Penyebarluasan Pembangunan Media Elektronik, pengelolaan Website sehingga total Anggaran Biro Humas setelah perubahan menjadi sebesar **RP.9.940.624.000,-.**

Secara umum, seluruh anggaran ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan guna mencapai 3 sasaran yang disepakati dalam dokumen penetapan kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD 2016-2021.

1. Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1.Hasil Pengukuran Kinerja Biro Humas Tahun 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** |
| 1 | Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaran pemerintahan Provinsi Sumatera Barat | Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | **15 besar nasional** | **Peringkat 11** |
| 2 | Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat | Indeks Keterbukaan Informasi Publik | **55** | **73,05** |
| 3 | Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat | Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat | **2,2** | ***Belum di nilai oleh pemerintah Pusat*** |

**Sasaran Strategis I : MENINGKATNYA PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis peningkatan produktifitas penyebarluasan informasi pemerintah provinsi Sumatera Barat yang diukur berdasarkan kerjasama dengan inteligent Media Management (IMM). Biro Humas melaksanakannya melalui 2. program :

1. **Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan **8** kegiatan**dan**
2. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**dengan 2 kegiatan

diuraian dalam tabel 2 berikuti ini:

**Tabel 2.Realisasi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Sasaran I**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **PROGRAM /KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI** | **%** |
| 1 | Produktifitas penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah | **Ranking 15 besar** | **Penyebarluasan informasi Penyelenggaran Pemerintah daerah** | **2.271.006.000** | **2.169.911.125** | **95,44** |
| Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah | 750.000.000 | 740.661.550 | 98,78 |
| Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak | 748.339.000 | 739.698.500 | 98,85 |
| Penyebarluasan Informasi melalui Elektronik | 360.851.000 | 304.739.125 | 84,45 |
| Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan | 86.336.000 | 82.550.700 | 95,62 |
| Pembuatan Film Dokumentasi Potensi | 35.000.000 | 33.741.000 | 96,40 |
| Penyebarluasan Informasi melalui media ruang | 272.480.000 | 268.520.250 | 98,55 |
| Penyebaran Informasi Penyelenggraan Pemerintah Daerah (ILPPD) | 70.961.000 | 70.488.500 | 99,33 |
| **Program Informasi dan Komunikasi Publik** | **393.533.000** | **368.242.111** | **91,21** |
| Pengkajian Analisis Pemberitaan | 122.701.000 | 103.831.211 | 84,62 |
| Koordinasi Kehumasan | 270.832.000 | 264.410.900 | 97,79 |

Sesuai Tabel diatas yang mendukung Sasaran I yaitu Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ada 2 Program 1. Penyebarluasan informasi Penyelenggaran Pemerintah daerah dengan jumlah Anggraran sebesar **Rp.2.271.006.000** terlealisasisebesar Rp.**2.169.911.125** atausebesar **95,44**%danProgram Informasi dan Komunikasi Publik. Dengan jumlah anggaran sebesar **Rp**.**393.533.000** terealisasi sebesar Rp.**368.242.111** atau sebesar **91,21 %.**

Dengan pelaksanaan 8 kegiatan ini, Peringkat Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Sumatera Barat tahun 2016 berhasil menempatkan Sumbar pada ranking 11 dan realisasi tahun sebelumnya/tahun 2015 peringkat ke 13 atau dengan capaian 118,18 %. Target akhir Rensta diharapkan tercapainya target rangking 3 Nasional atau 100%. Secara sederhana, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 dengan target capaian akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi**  | **Target Akhir Renstra** | **Capaian s/d 2016 terhadap 2021** |
| 1 | Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah | Ranking 11 Nasional | Ranking 3 Nasional | 100 % |

**Sasaran Strategis 2 :MENINGKATNYA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pemerintah Provinsi menetapkan peningkatan keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu sasaran strategis dan indikator kinerja provinsi yang harus dicapai lima tahun kedepan yang diukur dengan menggunakan indeks capaian yakni **Indeks Keterbukaan Informasi Publik**tahun 2016 yang mesti dicapai: nilai **55 yang dinilai olehLembaga Independen Komisi Informasi Pusat.** Untuk Tahun 2016 hasil dari penilaian Komisi Informasi Pusat bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat mendapat nilai Memperoleh Nilai Indeks 73,05 di Tingkat nasional. dengan kategori **cukup informatif.** Atas capaian ini, Pemprov Sumbar berhasil menempati peringkat 10 besar provinsi informatif dari 34 Provinsi se-Indonesia.Atas prestasi ini, Gubernur langsung menerima penghargaan dari Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia di penghujung tahun 2016.

Untuk mendukung Sasaran II diatas yaitu Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui 2 Program dengan anggaran dan telah direalisasikan beserta tingakt effisiensi penggunaan anggaran kedua program tsb. sbb:

**I. Program Informasi dan Komunikasi Publik** dengan jumlah Anggraran sebesar **Rp.524.312.000**terlealisasi sebesar Rp.**353.791.779**atau sebesar **67,47** % dan

**II. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika.**

Dengan jumlah anggaran sebesar **Rp**.**2.191.000.000** terealisasi sebesar Rp.**1.989.119.550** atau sebesar **90,79 %** yang diuraikan Sesuai Tabel 2 dibawah ini

**Tabel 2.Realisasi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja Sasara II**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **PROGRAM /KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALSASI (keu)** | **(%)** |
| 2 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik. | **55** | 1. **Informasi dan Komunikasi Publik**
 | **524.312.000** | **353.791.779** | **67,47** |
| 1.Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik | 190.873.000 | 101.476.225 | 53,16 |
| 2.Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) | 45.871.000 | 34.773.286 | 75,81 |
| 3.Pemberdayaan Kelompok Media Tradisonal | 146.068.000 | 114.621.305 | 78,47 |
| 4.Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko | 73.000.000 | 63.203.813 | 86,58 |
| 5.Bimtek Pelayanan Informasi Publik | 68.500.000 | 39.717.150 | 57,98 |
| **II.Pengembangan Komunikasi dan Informatika**  | **2.191.000.000** | **1.989.119.550** | **90,79** |
| 6.Pengelolaan Website Pemprov.Sumbar | 300.000.000 | 291.497.600 | 97,17 |
| 7.Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom | 1.891.000.000 | 1.697.950 | 88,77 |

2 Program dengan 7 kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. **Program Informasi dan Komunikasi Publik** dituangkan kedalam5 kegiatan:
2. Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
3. Pemberdayaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
4. Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional;
5. Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko
6. Bimtek Pelayanan Informasi Publik
7. **Pengembangan Komunikasi dan Informatika**dengan 2 kegiatan:
8. Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar
9. Lanjutan Pembangunan Gedung Infokom

telah ditetapkan Indikator Kinerja masing-masing kegiatan tersebut diatas dan realisasinya capaian kinerja dapat diukur dan tergambar dalam Tabel berikut ini**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| 1 | Persentase Pelayanan permintaan Informasi yang terpenuhi oleh PPID | 80% | 100% | **125%** |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelompok Informasi masyarakat | 100 % | 100 % | **100 %** |
| 3 | Meningkatnya kualitas kelompok tradisional masyarakat  | 100 % | 100 % | **100 %** |
| 4 | Persentase PPID Kab/Kota yang terbentuk dan pengelolaan DIP | 80 % | 142,42% | **178,02%** |
| 5 | Persentase meningkatnya kualitas SDM dalam pelayanan informasi | 100 % | 100% | **100%** |
| 6 | Persentase data informasi yang diinput oleh operator SKPD ke dalam website Sumbarprog.go.id | 80 % | 116,59% | **145,73 %** |
| 7 | Persentase rampungnya gedung Inforkom  | 100 % | 100 % | **100 %** |
|  | **Rata-rata capaian** |  |  | **121,25 %** |

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja program kegiatan sebesar 121,25 % (kategori sangat baik) dengan perolehan Indeks keterbukaan Informasi Publik 73,05 dari Lembaga Independen Komisi Informasi Pusat tahun 2016. Indeks Tahun 2016 lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Provinsi sebesar 22,05 sehingga dalam hal ini Biro Humas termasuk dalam kategori **berhasil.**

Perbandingan Realisasi capaian kinerja dengan target akhir rensta Biro Humas dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi**  | **Target Akhir Renstra** | **Capaian s/d 2016 terhadap 2021** |
| 1 | Indeks Keterbukaan Informasi Publik  | 73,05 | 80 | 91,31 % |

Biro Humas menargetkan nilai 80 pada akhir RPJMD dan Renstra Biro Humas 2016-2021, sedangkan indeks tahun 2016 yang diperoleh 73,05%, maka dapat dihitung capaian kenerja 2016 terhadap target mesti diwujudkan tahun 2021, telah tercapai 91,31%. Peningkatan yang harus diupayakan Pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2017 untuk berada pada peringkat 80 pada target akhir Rensta yang diharapkan tercapainya target rangking 3 Nasional atau 100%.

**Sasaran Strategis III : MENINGKATNYA NILAI INDEKS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PROVINSI SUMATERA BARAT**

Salah satu indikator kinerja utama Biro Humas adalah indeks e-Goverment Provinsi sumatera Barat yang mesti dicapai tahun 2016 adalah 2,2. Target nilai indeks ini terkait langsung dengan penetapan IKU sararan Misi 2 dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Untuk bisa merealisasikan target IKU tersebut Biro Humas salah satu unit kerja/SKPD yang diserahi beban tanggung jawab guna mewujudkan terselenggaranya e-Goverment di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, yangmana pada tahun 2016 Biro Humas melaksanakan melalui Program “Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat”. Program ini masih merupakan bagian dari Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika lainnya yang diselenggarakan oleh Biro Humas karena saat penyusunan program dalam masa transisi dari Permendagri 13 Tahun 2016 ke penerapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait pelaksanaan e-Government ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika menyusun suatu Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) sebagai model untuk menganalisis penerapan e-Government di instansi-instansi pemerintah baik di tingkat Kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Lembaga Pemerintah secara nasional.

PeGI memiliki 5 (lima) dimensi penilaian, yakni: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi ini nantinya akan diberikan bobot yang sama dalam penilaian dengan mempertimbangkan arti penting masing-masing dimensi.

Secara umum kategori penilaian terhadap tata kelola e-Government dalam PeGI, sebagai berikut:

1. Nilai 1,0 sampai dengan 1,49 (sangat kurang) Indikator tidak ada sama sekali atau sangat kurang dari segi jumlah dan kualitas

2. Nilai 1,5 sampai dengan 2,49 (kurang) Indikator sudah ada namun masih perlu ditambah dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas

3. Nilai 2,5 sampai dengan 3,49 (baik) Indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan e-Government namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi e-Government pada masa yang akan datang

4. Nilai 3,5 sampai dengan 4,0 (sangat baik) Indikator baik dari segi jumlah maupun kualitas sangat baik. Dampak pada penerapan e-Government terlihat sangat nyata. Kesiapan untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang sudah terlihat jelas.

Penilaian terhadap tata kelola e-Goverment dalam PeGI tingkat Provinsi terhadap indikator Kinerja utama sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan sekaligus Biro Humas salah satu penanggung jawab terselenggaranya e-Goverment Pemerintah Provinsi untuk tahun 2015, KemenKominfo Pusat memberikan penilaian rata-rata kepada Pemprov Sumbar 2,01 dengan kriteria kategori **kurang**.

Dari penilaian PeGI tersebut berdasarkan 5 dimensi penilaian pelaksanaan e-Goverment Pemprov Sumatera Barat sbb:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROVINSI** | **DIMENSI** | **RATA-RATA** | **KATEGORI** |
| **KEBIJAKAN** | **KELEMBAGAAN** | **INFRASTRUKTUR** | **APLIKASI** | **PERENCANAAN** |
| 15 | Sumatera Barat | 2,07 | 1,93 | 2,13 | 2,13 | 1,80 | 2,01 | Kurang |

Kontribusi Biro Humas dalam memenuhi target indeks e-Goverment Provinsi Sumatra Barat tahun 2016 telah di realisasikan melalui program**Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah** dengan 3 kegiatan yaitu:

1. Implementasi e-Government Pemprov.Sumbar
2. Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Goverment Kab/Kota
3. Implementasi Mobile Community Acces Point (M-CAP)

**Tabel 4. Realisasi penggunaan sumber daya indikator kinerja sasaran III**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **PROGRAM /KEGIATAN** | **ANGGARAN** | **REALSASI** | **(%)** |
| 3. | Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat | **2,2** | **Pengelolaan e- Government Pemerintah Daerah** | **2.463.159.000** | **1.140.743.520** | **49,72** |
| 1. Koordinasi Pembinaan Implementasi e- Government Kab/Kota | 62.873.000 | 58.763.115 | 93,46 |
| 2. Implementasi e- Government Pemprov Sumbar | 2.330.434.000 | 1.013.366.280 | 43,48 |
| 3.Implemetasi Mobile Community Access Point (M-CAP) | 69.852.016 | 68.614.125 | 98,23 |
|  |  |  |  |

Sesuai Tabel diatas yang mendukung Sasaran III yaitu Meningkatnya nilai Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan melalui 1 Program Pengelolaan e- Government Pemerintah Daerah.

dengan alokasi APBD tahun 2016 untuk program ini sebesar **Rp.2.463.159.000,** terlealisasikan hingga 31 desember 2016 sebesar Rp.**1.140.743.520** atau sebesar (**43,48 %)** Realisasi anggaran dibawah 80% adalah kegiatan Implementasi e-Government Pemprov Sumbar yang indikator kinerjanya adalah Persentase SKPD yang telah memanfaatkan Aplikasi teknologi Informasi E-Goverment realisasinya dibawah target karena beberapa aplikasi yang sedang dalam pengerjaan dan sejumlah aplikasi yang belum dimanfaatkan pengguna.

Capaian kinerja 3 kegiatan ini dapat dihitung melalui indikator kinerja masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **CAPAIAN** |
| 1 | Persentase SKPD yang telah memanfaatkan Aplikasi teknologi Informasi E-Goverment | 80% | 39,70% | **49,62%** |
| 2 | Persentase Jumlah aplikasi e–Government tersedia | 100% | 113,33% | **113,33%** |
| 3 | Persentase pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat kabupaten/kota  | 80 | 75,48 % | **94,35 %** |
| 4 | Persentase Pemanfaatan aplikasi telematika oleh masyarakat di kabupaten/kota | 100 % | 180 % | **180 %** |
| **RATA-RATA CAPAIAN** | **109,32** |

**II.1.2. REALISASI ANGGARAN BIRO HUMAS TAHUN 2016**

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dan pemenuhan capaian Sasaran Strategis tahun 2016 Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tersedia anggaran sebesar Rp. 9.940.624.000. Hingga 31 Desember 2016, anggaran tersebut telah direalisasikan dengan persentase sebesar 81,31% atau sebesar Rp. 8.082.971.204, dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **KINERJA KEUANGAN** |
| **ANGGARAN** | **REALISASI** | **PERSENTASE** |
| **I** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **1.563.970.000** | **1.526.050.119** | **97.58** |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 9.960.000 | 9.956.000 | 99,96 |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 927.700.000 | 892.474.589 | 96,20 |
| 3 | Penyediaan jasa jaminan barang milir daerah | 17.000.000 | 16.007.000 | 94,16 |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | 12.460.000 | 12.442.600 | 99,86 |
| 5 | Penyediaan barang cetak dan penggandaan | 41.350.000 | 41.245.000 | 99,75 |
| 6 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 298.000.000 | 297.948.000 | 99,98 |
| 7 | Penyediaan makan dan minum | 6.000.000 | 5.990.000 | 99,83 |
| 8 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | 198.000.000 | 196.736.930 | 99,36 |
| 9 | Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi  | 53.500.000 | 53.250.000 | 99,53 |
| **II** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **291.108.000** | **262.532.500** | **96,40** |
| 10 | Pengadaan meubeler | 15.100.000 | 3.600.000 | 23,84 |
| 11 | Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi | 25.000.000 | 10.650.000 | 42,60 |
| 12 | Pengadaan PeralatanStudio, Komunikasi dan Informasi | 59.500.0000 | 59.300.000 | 99,66 |
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi, alat informasi | 3.500.000 | 3.470.000 | 99,14 |
| 14 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional | 77.098.000 | 75.497.500 | 97,92 |
| 15 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor | 2.900.000 | 2.900.000 | 100 |
| 16 | Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi | 6.600.000 | 6.590.000 | 99,85 |
| 17 | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan | 78.350.000 | 28.350.000 | 100 |
| 18 | Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian asset SKPD | 23.060.000 | 23.025.000 | 99,85 |
| **III** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **97.400.000** | **25.584.000** | **26,27** |
| 19 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 97.400.000 | 25.584.000 | 26,27 |
| **IV** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **92.625.000** | **92.508.000** | **99,87** |
| 20 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.610.000 | 5.569.000 | 99,27 |
| 21 | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | 7.800.000 | 7.750.000 | 99,36 |
| 22 | Penatausahaan SKPD | 79.215.000 | 79.189.000 | 99,97 |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANAGAN APARATUR** | **68.500.000** | **39.717.150** | **57,98** |
| 23 | Bimtek Pelayanan Informasi Publik | 68.500.000 | 39.717.150 | 57,98 |
| **V** | **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **848.895.000** | **682.316.740** | **80,38** |
| 24 | Pengelola Pelayanan Informasi Publik | 190.873.000 | 101.476.225 | 53,16 |
| 25 | Koordinasi dan Pengembangan Pelayanan PPID Provinsi dan Kab/Ko | 73.000.000 | 63.203.813 | 86,58 |
| 26 | Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM | 45.871.000 | 34.773.286 | 75,81 |
| 27 | Pengkajian Analisas Pemberitaan  | 122.701.000 | 103.813.211 | 84,62 |
| 28 | Koordinasi Kehumasan | 270.832.000 | 264.410.900 | 97,79 |
| 29 | Pemberdayaan Kelompok Media Tradisional | 146.068.000 | 114.621.305 | 78,47 |
| **VI** | **PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN** | **2.323.967.000** | **2.240.399.625** | **88,91** |
| 30 | Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah | 750.000.000 | 740.661.550 | 98,78 |
| 31 | Penyebarluasan informasi Pembangunan Melalui Media Cetak | 748.339.000 | 739.698.500 | 98,85 |
| 32 | Penyebarluasan informasi Melalui Elektronik | 360.851.000 | 304.739.125 | 84,45 |
| 33 | Penyebarluasan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) | 70.961.400 | 70.488.500 | 99,33 |
| 34 | Laporan khusus visualisasi pembangunan | 86.336.000 | 82.550.700 | 95,62 |
| 35 | Pembuatan Film Dokumentasi Potensi  | 35.000.000 | 33.741.000 | 96,40 |
| 36 | Penyebaraluasan Informasi melalui Media Ruang | 272.480.000 | 268.520.250 | 98,54 |
| **VII** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN iNFORMATIKA** | **2.191.000.000** | **1.989.119.550** | **90,76** |
| 37 | Pengelolaan Website Pemprov. Sumbar | 300.000.000 | 291.497.600 | 97,17 |
| 38 | Lanjutan Pembangunan Gedung Inforkom | 1.891.000.000 | 1.697.621.950 | 89,77 |
| **VIII** | **PROGRAM PENGELOLAAN e-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH** | **2.463.159.000** | **1.224.743.520** | **49,72** |
| 39 | Koordinasi Pembinaan Implementasi e-Goverment Kab/Ko | 62.873.000 | 58.763.115 | **93,46** |
| 40 | Implementasi e-Government Pemprov.Sumbar | 2.330.434.000 | 1.097.366.280 | **47,09** |
| 41 | Implementasi *Mobile Community Access Point* (M-CAP) | 69.852.016 | 69.468.125 | **99,45** |
|  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | **9.940.624.000** | **8.082.971.204** | **81,31** |

**II.1.3 FAKTOR PENGHAMBAT DAN IMPLIKASI TERHADAP TARGET RENSTRA BIRO HUMAS 2016-2021 DAN KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN YANG DIPERLUKAN**

Dengan memperhatikan analisis capaian kinerja yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 2 dari 5 sasaran strategis yang sebelumnya ditetapkan tidak tercapai. Pada dua sasaran strategis tersebut yakni:

Pada sasaran strategis ‘Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan informasi publik’diketahui bahwa **sebab rendahnya nilai realisasi indikator kinerja yang berujung pada nilai capaian indikator kinerja yang jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah masih belum termanfaatkannya aplikasi-aplikasi yang telah dirancang oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**. **Selain itu, belum termanfaatkannya aplikasi juga disebabkan oleh belum sempurnanya aplikasi-aplikasi yang telah dirancang tersebut.**

Dalam pencarian lebih lanjut dan mendalam mengenai pemicu utama yang menyebabkanrealisasi kinerja yang tidak memuaskan ini, didapati **faktor utama yang memberi pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung, yakni belum tersedianya dokumen *grand design* dan dasar regulasi yang memayungi pengembangan *e-Government* di Provinsi Sumatera Barat** yang berdampak pada dua hal, yakni:

1. Tidak terarahnya pengembangan aplikasi pendukung *e-Government*;
2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal; percepatan penetrasi TI ke sistem pemerintahan untuk proses administasi internal yang lebih efisien dan efektif dan pelayanan publik yang cepat dan transparan; memanfaatkan peluang membangun aplikasi sesuai kebutuhan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk memperbaiki hal ini, dalam perencanaan ke depan terkait penerapan *e-Government* di Provinsi Sumatera Barat akan diupayakan penyusunan dokumen *grand design* dan payung hukum penerapan *e-Government* Sumatera Barat dengan terlebih dahulu melakukan kajian mendalam dan komprehensif terkait kondisi dan potensi Sumatera Barat terkait penerapan *e-Government* untuk mereduksi kemungkinan perencanaan yang tidak tepat sasar dan tidak berdampak.

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEHUMASAN DAERAH**

Pada sasaran strategis ‘peningkatan kualitas sumber daya manusia kehumasan daerah’ diketahui bahwa **sebab rendahnya nilai realisasi indikator kinerja yang berujung pada nilai capaian indikator kinerja yang jauh dari target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah tidak adanya instrumen untuk mengukur realisasi indikator kinerja**. Hal ini menyebabkan 6 dari 12 indikator kinerja sasaran strategis tidak dapat diukur dampak pelaksanaannya. 6 indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Koordinasi;
2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;
3. Pembinaan Kelompok Media Tradisional;
4. Koordinasi kehumasan daerah (Bakohumas);
5. Implementasi *Mobile Community Access Point* (M-CAP).

Ini mengakibatkan nilai rata-rata realisasi kerja sasaran tetap rendah walaupun capaian dua indikator kinerja lain mendapatkan nilai yang tergolong baik. Selain itu, belum adanya penilaian dari pusat terhadap penyelenggaraan e-Gov Sumatera Barat juga menyebabkan tidak ternilainya sejumlah kegiatan yang berhasil dicapai Biro Humas dalam tahun anggaran 2016 ini, namun adanya prestasi nasional untuk Pemprov. Sumbar yang cukup mengembirakan

1. Penilaian KIP Pusat terhadap keterbukaan informasi Publik di Sumatera Barat masuk penilaian 10 besar atau nilai (73,05) untuk kategori Pemerintah Provinsi.dengan kategori “Cukup Informatif” (data terlampir )
2. Meningkatnya Produktifitas Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah dinilai oleh lembaga survey nasional IMM diperingkat 11 nasional walaupun belum masuk dalam 10 besar nasional.
3. Jumlah Nagari yang dijangkau oleh M-CAP yang jauh melebihi jumlah Nagari yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

**Menindaklanjuti hal ini, akan dilakukan penyusunan instrumen pengukuran realisasi kinerja yang berorientasi *Outcome* agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terukur tingkat capaian kinerjanya**. Diharapkan, adanya instrumen tersebut akan memberi dampak positif terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Humas di tahun-tahun mendatang.

**II.1.4 FAKTOR PENDUKUNG CAPAIAN**

Terlepas dari tidak tercapainya target dua sasaran strategis yang digariskan, Biro Humas berhasil memenuhi bahkan melebih target di 3 sasaran strategisnya yang pencapaian masing-masingnya dapat dikategorikan sebagai **Sangat Baik**, yakni:

1. Meningkatkan penyebarluasan informasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah;
2. Meningkatkan pelayanan informasi publik; dan,
3. Meningkatkan kualitas pelayanan jaringan sistem informasi manajemen.

Bagaimanapun, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mencapai target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan ditemukan sejumlah hal yang patut menjadi catatan untuk bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan perencanaan sasaran/program/kegiatan Biro Humas di tahun-tahun mendatang, antara lain:

1. Dalam indikator kinerja sasaran ‘Meningkatkan penyebarluasan informasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,’ media massa yang digunakan sebagai kanal penyebarluasan informasi sebagian besarnya -jika enggan dikatakan seluruhnya- merupakan media-media konvensional yang sebagiannya -berdasar pada kajian APJII dan PusKaKom Universitas Indonesia yang diterbitkan pada medio 2015- tidak menyasar beberapa segmen masyarakat dan sebagian lainnya telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memanfaatkan dan menambahkan beberapa media informasi baru seperti media sosial berbasis internet, jejaring sosial berbasis internet, *website* sumbarprov.go.id, dan portal-portal berita berbasis internet sebagai indikator kinerja sasaran di tahun-tahun mendatang. Sejumlah landasan pikir bagi gagasan ini, sebagai berikut;
* Jumlah pengguna media-media tersebut yang terus meningkat seiring penetrasi TI terutama di bidang komunikasi personalyang menggeser posisi beberapa media massa *mainstream* di kelompok masyarakat urban dan kelompok usia produktif;
* Pemanfaatan dan penambahan sejumlah media berbasis internet tersebut pada dasarnya juga dapat dianggap sejalan dengan rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kominfo untuk lima tahun ke depan yakni peningkatan pengembangan, pemanfaatan, dan penyusunan regulasi Jaringan Pita Lebar;
* Media-media berbasis internet bersifat *real-time*. Dengan demikian, pemerintah daerah -dalam hal ini, terutama Biro Humas- dapat menyebarluaskan informasi secara cepat dengan hambatan yang relatif kecil;
* Penyebarluasan informasi menggunakan media-media berbasis internet membutuhkan biaya yang relatif tidak besar; dan
* Berbeda dengan media konvensional, komunikasi melalui media-media berbasis internet cenderung bersifat dua arah. Dengan demikian, ia dapat digunakan sebagai kanal untuk menampung/menanggapi aspirasi publik secara langsung dan lebih cepat. Dalam hipotesa sementara dapat diasumsikan, komunikasi personal yang tanggap dari penyelenggara pemerintahan terhadap masyarakat akan memberi pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
1. Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran kepuasan pelayanan publik, diseminasi informasi mengenai UU KIP dan pembentukan PPID, beberapa hal yang menjadi catatan; belum adanya komitmen yang kuat dari pimpinan SKPD dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat; masih rendahnya determinasi dan integritas sebagian besar PPID Pembantu dalam mendokumentasikan, mengelola, dan melakukan pengarsipan atas informasi yang dimilikinya secara tertib dan teratur.

**Tabel C.V**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan**

**Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2017**

**Provinsi Sumatera Barat**

**Nama OPD: BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH SUMATERA BARAT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)** | **TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2017** | **REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2015** | **TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU** | **TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2017)** | **PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN** |
| **TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016** | **REALISASI RENJA OPD TAHUN 2016** | **TINGKAT REALISASI (%)** | **REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN** | **TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8 = (7/6)** | **9** | **10=(5+7+9)** | **11=(10/4)** |
|  | 01 | 01 |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran** | 40 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100 % | 300,00% | 750,00% |
|  |  |  | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya kebutuhan administrasi surat menyurat | 100% | 100 % | 100 % | 99,96% | 100% | 100% | 299,96% | 299,96% |
|  |  |  | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Terselengaranya jasa telepon , banidwith, Internet, Radio Link | 100% | 100 % | 100 % | 96,20% | 96% | 100% | 296,20% | 296,20% |
|  |  |  | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Terpeliharanya kenderaan Operasional | 100% | 100 % | 100 % | 94,16% | 94% | 100% | 294,16% | 294,16% |
|  |  |  | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya alat tulis perkantoran | 100% | 100 % | 100 % | 99,86% | 100% | 100% | 299,86% | 299,86% |
|  |  |  | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terpenuhnya barang cetakan dan pengandaan untuk perkantoran  | 100% | 100 % | 100 % | 99,75% | 100% | 100% | 299,75% | 299,75% |
|  |  |  | 14 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan | Terpenuhnya kebutuhan pendukung penyelengaaran rapat-rapat | 100% | 100 % | 100 % | 99,98 | 99,98% | 100% | 299,98% | 299,98% |
|  |  |  | 16 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terselengaranya penunjang makan minum rapat rapat  | 100% | 100 % | 100 % | 99,83 | 99,83% | 100% | 299,83% | 299,83% |
|  |  |  | 17 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah | Terselengaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah  | 100% | 100 % | 100 % | 99,36 | 99,36% | 100% | 299,36% | 299,36% |
|  |  |  | 18 | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Tersedinya penyediaan jasa dokumentasi | 100% | 100 % | 100 % | 99,53 | 99,53% | 100% | 299,53% | 299,53% |
|  | 01 | 02 |  | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persentase berfungsinya sarana dan prasarana Aparatur** | 40 % | 100 % | 100 % | 90,18 % | 90% | 100 % | 290,18% | 725,45% |
|  |  |  | 19 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional | Terpeliharanya Mobil Dinas Dan Jabatan | 100% | 100 % | 100 % | 97,92 % | 98% | 100% | 297,92% | 297,92% |
|  |  | 1 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  | 23 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan perkantoran | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 300% | 300,00% |
|  |  |  | 25 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Jaringan | Terlaksananya Pemeliharaan Infrstuktur jaringan LAN / internet Perov Sumbar | 100% | 100 % | 100 % | 98,92% | 99% | 100% | 298,92% | 298,92% |
|  | 01 | 05 |  | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persentase berfungsinya sarana dan prasarana Aparatur** | 40 % | 100 % | 100 % | 26,27% | 26% | 100 % | 226,27% | 565,68% |
|  |  |  | 03 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terselengaraanya Pengembangan SDM Aparatur Humas yang berkualitas | 100% | 100 % | 100 % | 26,27% | 26% | 100% | 226,27% | 226,27% |
|  |  | 06 |  | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Tingkat Kesesuaian Pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD** | 40 % | 100 % | 100 % | 99,87 | 99,87% | 100 % | 299,87% | 749,68% |
|  |  |  | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Terpenuhinya laporan kegiatan SKPD | 100% | 100 % | 100 % | 99,27 | 99,27% | 100% | 299,27% | 299,27% |
|  |  |  | 04 | Penatausahaan Keuangan OPD | Tepenuhnya Kegiatan Pentausahaan SKPD | 100% | 100 % | 100 % | 99,97 | 99,97% | 100% | 210,00% | 210,00% |
|  |  | 07 |  | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN KEGIATAN & ASET** | **Meningkatnya penataan Program kerja dan kegiatan OPD sesuai aturan** | 40 % | 100 % | 100 % | 0 % | 0% | 100 % | 200,00% | 500,00% |
|  |  |  | 01 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD | Terpenuhya Perencanaan Kegiatan SKPD | 100% | 100 % | 100 % | 99,36 | 99,36% | 100% | 299,36% | 299,36% |
|  |  |  | 03 | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | Terpenuhnya Kegiatan pengelolaan Pengawasan Aset SKPD | 100% | 100 % | 100 % | 99,85 | 99,85% | 100% | 299,85% | 299,85% |
|  |  | 17 |  | **PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **Peringkat sebaran kegiatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat** | Peringkat 10 | Peringkat 13 | Peringkat 13 | Peringkat 11 | 125 % | Peringkat 10 | Peringkat 11 | 125 % |
|  |  |  | 01 | Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah | Jumlah press-release hasil liputan (300 press rerlease, 60.000 pembeitaan) | 100% | 100 % | 100 % | 98,75% | 100% | 100% | 298,75% | 298,75% |
|  |  |  | 02 | Koordinasi Kehumasan | Meningkatnya SDM kehumasan  | 100% | 100 % | 100 % | 97,79% | 96% | 100% | 297,79% | 297,79% |
|  |  |  | 03 | Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak | Jumlah publikasi Pemprov. Tersebarnya Informasi pembangunan melalui media cetak pada masyarakat | 100% | 100 % | 100 % | 98,85% | 94% | 100% | 298,85% | 298,85% |
|  |  |  | 04 | Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Elektonik | Terlaksananya Dialog Interaktif melaui Media Televisi dan Radio (86 x) +siaran tunda +HPN dialog interaktif+ Loncing HPN di TVRI pusat  | 100% | 100 % | 100 % | 84,45% | 100% | 100% | 284,45% | 284,45% |
|  |  |  | 05 | Pengkajian Analisa Pemberitaan | Ratsio pemberitaan dan Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan analisa isu publik (48 ) | 100% | 100 % | 100 % | 84,62% | 100% | 100% | 284,62% | 284,62% |
|  |  |  | 06 | Pembuatan Film Dokumenter | Jumlah film dokumenter yang dibuat ( 3 paket film dokumenter) | 100% | 100 % | 100 % | 96,40% | 99,98% | 100% | 296,40% | 296,40% |
|  |  |  | 07 | Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Ruang | Jumlah publikasi pemberitaan Pemprov. Sumbar di media luar ruang (5 buah)  | 100% | 100 % | 100 % | 98,55% | 99,83% | 100% | 298,55% | 298,55% |
|  |  |  | 08 | Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan  | Jumlah Buku Visualisasi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, (100 exp | 100% | 100 % | 100 % | 95,62% | 99,36% | 100% | 295,62% | 295,62% |
|  |  |  | 09 | Rapat Koordinasi PPID Provinsi, Kabupaten/Kota se Sumatera Barat | 2 kali Rakordinasi PPID Provinsi dengan PPID Kab/Kota, dan SOP Kab/Kota | 100% | 100 % | 100 % | 86,58% | 99,53% | 100% | 286,58% | 286,58% |
|  |  |  | 10 | Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik | Pengelolaan Daftar Informasi Publik dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada publik serta turunnya jumlah sengketa informasi | 100% | 100 % | 100 % | 53,16% | 90% | 100% | 253,16% | 253,16% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**%**

**II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD**

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsinya, Biro Humas menerjemahkan Visi Pembangunan Sumatera Barat ke dalam Visi Pembangunan Biro Humas Tahun 2016-2021, yakni:

*“Terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien”*

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan ini, Biro Humas menetapkan dua Misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam Analisis kinerja pelayanan SKPD Biro Humas berdasarkan Capaian kinerja pelayanan SKPD Biro Humas tahun 2016 kedua misi diatas merupakan wujud dari pelayanan biro humas sesuai tugas pokok dan fungsinya

Wujud pelayanan SKPD tersebut dituangkan kedalam program dan kegiatan Biro Humas.

Adapun kinerja program dan kegiatan yang terkait dengan kinerja pelayananan adalah terutama dalam rangka mendukung Tujuan Misi 2 Biro Humas: yaitu

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Terdapat 2 (dua) program pada biro Humas tahun 2016 terkait dengan pelayanan informasi dan peneyenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi Informasi, dimana program ini telah dimulai pada tahun 2015 yaitu :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Pada program informasi dan Komunikasi Publik terdapat 1 indikator kegiatan yang mewujudkan pelayanan ;

1. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

dengan indikator kinerja: Persentase Pelayanan permintaan informasi yang terpenuhi oleh PPID

Ad.1. Penetapan kepuasan pelayanan informasi sebagai indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik adalah salah satu unsur untuk mencapai sasaran strategis “meningkatkatnya keterbukaan informasi Publik Provinsi Sumatera Barat”.

“Pelayanan informasi publik” dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan PPID kepada masyarakat dan siapapun yang membutuhkan informasi daerah untuk tujuan-tujuan yang dapat dipertangungjawabkan.

Telah dimulai dalam tahun 2015, selain pelayanan informasi publik secara langsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan, PPID Prov. Sumbar juga telah membuat website www.ppid.sumbarprov.go.id secara swadaya untuk mengantisipasi permintaan pelayanan informasi secara elektronik.

Pembuatan website PPID membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan permintaan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan data pelayanan PPID kepada masyarakat Biro Humas selama semester I Tahun 2016 telah melayani permohonan informasi publik sebanyak 54 permohonan yang diterima melalui website, dan telah diproses dan kemudian dipenuhi sesuai standar pelayanan minimal.

Kemudian terdapat 5 (lima ) permohonan informasi secara langsung ke petugas pelayanan PPID dalam bentuk salinan data hardcopy, dan terdapat permohonan yang diterima kemudian diteruskan PPID pembantu yang ada pada dinas/badan/Biro dan atau Komisi informasi publik selaku lembaga pengawasan informasi publik.

Dari sisi pencapaian realisasi kinerja dan keuangan, bahwa dari 59 pemintaan pelayanan informasi yang masuk tahun 2016 tersebut telah terlayani seluruhnya, artinya realisasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik sebesar 100 % dengan demikian indikator kinerja kegiatan yakni persentase kepuasan pelayanan informasi publik sebesar 125 %.

**Tabel VI**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Humas Sekretariat Daerah**

**Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR** | **SPM/STANDAR NASIONAL** | **IKK** | **TARGET RENSTRA OPD** | **REALISASI CAPAIAN** | **PROYEKSI** | **CATATAN ANALISIS** |
| **TAHUN 2016** | **TAHUN 2017** | **TAHUN 2018** | **TAHUN 2019** | **TAHUN 2016** | **TAHUN 2017** | **TAHUN 2018** | **TAHUN 2019** |
| 1 | Persentase Pelayanan permintaan informasi yang terpenuhi oleh PPID | - |  | 80 % | - | - | - | 100 % | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

**II.3.1 RESTRUKTURISASI OPD SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH**

Sebelum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Biro Humas memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan, dan evaluasi hubungan masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XXII Pasal 391-395 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengumumkan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintahan Daerah lainnya kepada masyarakat.

Sebagai OPD yang memiliki fungsi melaksanakan hubungan masyarakat, Biro Humas juga memiliki kewajiban untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menuntut Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya melalui pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang efisien dan dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Sejalan dengan itu, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia Nomor 17/P/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, dalam mengejawantahkan dua kewajiban utamanya ini, Biro Humas dapat menggunakan sarana komunikasi, sebagai berikut:

1. Media Massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi;
2. Media Baru (*website*);
3. Media Tradisional seperti Kelompok Informasi Masyarakat atau Kelompok Media Tradisional;
4. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya;
5. Media Luar Ruang berupa buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk, dan baliho; dan,
6. Media Sosial.

Lebih lanjut, dalam Lampiran Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara jelas memberikan Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

**Tabel Target dan Panduan Operasional**

**Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PELAYANAN DASAR** | **STANDAR PELAYANAN MINIMAL** | **BATAS WAKTU** | **SATUAN KERJA** |
| **INDIKATOR** | **NILAI** |
| 1 | Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional | Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: |  |  | SKPD yang menangani urusan bidang Komunikasi dan Informatika |
| Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi | 12x per tahun | 1 Tahun |
| Media baru seperti *website* | Setiap hari | 1 Tahun |
| Media tradisional seperti pertunjukan rakyat | 12x pertahun | 1 Tahun |
| Media interpersonal | 12x per tahunper kecamatan | 1 Tahun |
| Media luar ruang | 12x per tahun | 1 Tahun |
| 2 | Pengembangan Pemberdayaan KIM | Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | 50% | 1 Tahun |

Bagaimanapun, Target dan Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang pada tabel di atas hanya terbatas pada tingkat Kabupaten/Kota, tidak di Tingkat Provinsi.

Berkaitan dengan itu, diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika pada akhir 2016 secara tidak langsung menghapus kewenangan Biro Humas terhadap hampir seluruh program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika di daerah dan melimpahkannya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika di daerah.

Belum rampungnya Peraturan Menteri Dalam Negeri menyangkut Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah sebagai regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menempatkan Biro Humas pada posisi tak kokoh dalam merumuskan dan merencanakan program dan kegiatannya.

Merespon hal tersebut, Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya merumuskan program dan kegiatan baru yang tetap mampu menunjang tercapainya Visi-Misi Pembangunan DaerahSumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 namun tidak menyelisihi tugas pokok, fungsi, dan wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Program dan kegiatan ini, secara umum, berhulu pada 8 (delapan) fungsi kehumasan, yakni:

1. Penyelenggaraan dukungan kehumasan kepada seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Publikasi program dan kegiatan seluruh Biro dan Kepala Daerah
3. Pembinaan Humas Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif, dan harmonisasi urusan komunikasi dan informatika;
5. Pengoordinasian dan pengonsolidasian Perangkat Daerah dalam rangka manajemen komunikasi krisis;
6. Peliputan kegiatan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah;
7. Pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah; dan,
8. Penyiapan bahan komunikasi Kepala Daerah serta menyampaikan pesan atau pernyataan mewakili Kepala Daerah.

**II.3.2 KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam konteks Penyebarluasan Informasi terkait Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah maupun Informasi Nasional, Biro Humas pada dasarnya perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk mendorongtersiarnya pemberitaan kegiatan dan kebijakan Kepala Daerah secara nasional dan menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional ke masyarakat secara terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya.

Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Provinsi melalui Diskominfo setelah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi yang didiseminasikan, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah cenderung terhambat.

Dalam konteks yang sama, Biro Humas seyogyanya menjalin kerjasama dengan SKPD yang bertanggungjawab di Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
2. Penanganan isu dan krisis komunikasi Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah dari aspek kehumasan;
3. Penyiapan *press-release*, sambutan, dan pidato Kepala Daerah berdasarkan briefing notes dari Diskominfo atau bahan komunikasi Kepala Daerah dari Perangkat Daerah lain;
4. Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah.

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan sejak 2011 lalu, namun proses penyebarluasan informasi masih terkesan tidak berjalan pada satu rel yang sama.

**II.3.3 KENDALA DAN HAMBATAN**

Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai pada Bab II.3.1 di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Biro Humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain:

1. Batasan Tugas Pokok dan Fungsi yang kabur antara Biro Humas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi menimbulkan tumpeng-tindih kebijakan atau program dan kegiatan yang dapat berujung pada inefisiensi;
2. Rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi kehumasan;
3. Sempitnya kewenangan Biro Humas dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah bahkan di lingkungan internal pemerintah sendiri;
4. Apatisme masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi kegiatan dan kebijakan Kepala Daerah.

**II.3.4 TANTANGAN DAN PELUANG**

Sejumlah tantangan dan peluang dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang timbul karena beragam faktor seperti: perkembangan TIK; perubahan *trend* komunikasi publik; dan kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan yang apabila dikelola dengan baik dan dimanfaatkan semaksimal mungkin akan berpengaruh baik terhadap peningkatan pelayanan Biro Humas, antara lain:

1. Perkembangan pesat TIK yang memungkinkan publik untuk selalu terkoneksi dengan jaringan internet melalui telepon genggam;
2. Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia dari 71,9 juta pengguna pada tahun 2013 menjadi 88,1 juta pengguna di tahun 2014 dimana 85% aktivitas penggunaan internet melalui perangkat *mobile*;
3. Banyaknya jumlah pengguna media sosial Indonesia (Peringkat ke-4 di dunia untuk jumlah pengguna Facebook dan peringkat ke-5 di dunia untuk jumlah pengguna Twitter);
4. Pergeseran *trend* media penyebar berita dan informasi dari media konvensional ke media daring dan media sosial;
5. Semakin kompleksnya *stakeholder* yang terlibat dan saling mempengaruhi di era keterbukaan dan digitalisasi informasi;
6. Semakin kaburnya kategori media massa *mainstream* dengan media sosial yang kini sama-sama memiliki pengaruh dalam pembentukan wacana dan opini publik;
7. Semakin cepatnya arus informasi yang tersebar secara masif yang seringkali menyulitkan publik untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan tanggapan balik;
8. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Kepala Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan menyebarluaskan; Informasi Pembangunan Daerah, mencakup; kondisi geografis Daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah; Informasi Keuangan Daerah, mencakup; informasi anggaran, informasi pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan; dan, Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya dengan menimbang sejumlah program prioritas pemerintah provinsi dan kondisi sumatera barat, antara lain:
* Pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan prioritas utama;
* Swasembada Pangan dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyiapkan strategi untuk mewujudkan swasembada pangan dengan membenahi dan membangun sejumlah irigasi di Sumatera Barat untuk membantu pengairan sawah, memaksimalkan peran penyuluh pertanian dalam menyosialisasikan dan mengajak masyarakat menggunakan metode yang efektif dan efisien sehingga hasil panen bisa lebih meningkat, dan terus mengembangkan metode baru baik berupa pertanian organik atau lainnya sehingga hasil panen bisa lebih banyak, serta memastikan ketersediaan pupuk bagi petani sehingga apabila saat dibutuhkan bisa langsung digunakan;
* Kebijakan pembangunan kemaritiman oleh Presiden RI yang menguntungkan Sumatera Barat dengan menimbang 2.000 km garis pantai Sumatera Barat, potensi ekonomi kandungan laut Sumatera Barat;
* Risiko Bencana Sumatera Barat, antara lain; Gempa bumi yang berada di Tingkat Resiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani; Tsunami yang berada di Tingkat Resiko I dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani; Letusan Gunung Berapi dari empat gunung api aktif yaitu Merapi, Tandikat, Talang dan Kerinci yang berada di Tingkat Risiko II, dalam arti, berpotensi menimbulkan jumlah korban yang besar namun kemungkinan untuk terjadinya rendah; Banjir yang berada di Tingkat Resiko I; Abrasi Pantai dan Badai Di Tingkat Risiko II, yaitu bencana yang dengan potensi jumlah korban yang amat besar namun kemungkinan terjadi rendah; longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang termasuk dalam tingkat risiko II dan III;
* Diberlakukannya ASEAN *Economic Community* (AEC) yang menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempersiapkan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mampu bersaing.
1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum maksimal diketahui oleh publik;
2. Ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik yang menuntut Pemerintah Daerah untuk menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti.
3. Masih rendahnya tingkat produktifitas pemberitaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Tingkat Nasional;
4. Belum terkelolanya seluruh saluran informasi dan komunikasi publik dalam rangka diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

**II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Pada tahap awal pengusulan renja Biro Humas 2018 dan pembahasan awal renja Biro Humas sebagai bagian bahan usulan rancangan RKPD tahun 2018, dimana Biro humas belum mencantumkan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2018,

Kemudian dengan ditetapkannya Hari Pers Nasional Tahun 2018 di Sumatera Barat yang direncanakan diselenggarakan bulan Februari tahun 2018, maka dilakukan penyempurnaan Renja Biro Humas. Penyempurnaan Renja ini berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/846.A/IV/RENMAKRO/Bappeda-2017 tentang Penyempurnaan rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018.

Dengan edaran ini Biro Humas mengajukan revisi rencana anggaran untuk mendukung kegiatan HPN Tahun 2018 disamping mengajukan anggaran untuk mendukung Pra HPN pada anggaran perubahan 2017.

Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal RKPD) sebagaimana tergambar dalam Tabel.T-VI.C.7)

|  |
| --- |
| **Tabel T.VI.C.VII** |
| **Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2018** |
| **Provinsi Sumatera Barat** |
| **OPD : BIRO HUMAS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **No.** | **Rancangan Awal RKPD** | **No** | **Hasil Analisis Kebutuhan** | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target**  | **Pagu**  | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target**  | **Kebutuhan**  |
| **Capaian** | **Indikatif**  | **Capaian** | **Dana** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| ***I*** | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** |   | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran** |   |  **1.181.472.800**  | ***I*** |  |   |  |  |   |   |   |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sumatera Barat | Tersedianya kebutuhan administrasi surat-menyurat untuk kepentingan dinas | 100% |  13.000.000  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | Sumatera Barat | Terselenggaranya jasa telepon, bandwith, astinet, radio link SKPD | 100% |  138.000.000  | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Sumatera Barat | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | 100% |  18.100.000  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Sumatera Barat | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis perkantoran | 100% |  19.961.800  | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Sumatera Barat | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk perkantoran | 100% |  37.601.000  | 5 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan | Sumatera Barat | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% |  321.789.000  | 6 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Sumatera Barat | Terpenuhinya kebutuhan pendukung penyelenggaraan rapat-rapat | 100% |  49.920.000  | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah | Dalam dan Luar Provinsi | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah | 100% |  467.966.000  | 8 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Sumatera Barat | Terselenggaranya penyediaan jasa dokumentasi | 100% |  115.135.000  | 9 |   |   |   |   |   |   |
| ***II*** | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** |   | **Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur** |   |  **630.929.950**  | ***II*** |  |   |  |  |   |   |   |
| 10 | Pengadaan Meubeler | Sumatera Barat | Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran | 100% |  32.500.000  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 11 | *Pengadaan Peralatan rumah tangga* |   | Tersedianya sarana dan prasarana peralatan rumah tangga |   |  13.500.000  |  |  |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi | Sumatera Barat | Meningkatnya sarana dan prasarana perlengkapan kantor  | 100% |  170.000.000  | 10 |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Sumatera Barat | Terlaksananya sarana dan prasarana perlengkapan perkantoran | 100% |  79.000.000  | 11 |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Sumatera Barat | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | 100% |  25.850.000  | 14 |   |   |   |   |   |   |
|  14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instansi dan Jaringan | Sumatera Barat | Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan perkantoran | 100% |  35.000.000  | 15  |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | *Peleiharaan rutin berkala/kenderaan Dinas Operasional*  | *Sumatera Barat* | *Terpeiharanya kendraan dinas operasional* |  |  *80.907.500*  |  16 |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | *Penguatan Media Center Pemerintah Prov.Sumbar (baru)* | *Sumatera Barat* | *Terfasilitas masyarakat maupun kalangan pemerintah Ka/Ko*  |  |  *194.172.450*  | 17 |   |   |   |   |   |   |   |
| **III** | ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*** |   | **Persentase disiplin aparatur**  |   |  **120.618.450**  | ***III*** |  |   |  |  |   |   |   |
| 17 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Dalam dan Luar Provinsi | Terselenggaranya pengembangan SDM aparatur humas yang berkualitas | 100% |  84.866.000  | 18 |   |   |   |   |   |   |
| 19 | *Bimtek Jurnalistik (baru)* |  | *Telaksananya Bimtek Jurnalistik* |   |  *35.752.450*  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ***IV*** | ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*** |   | **Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD** |   |  **104.746.000**  | ***IV*** |  |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sumatera Barat | Terpenuhinya laporan kegiatan SKPD | 100% |  15.281.500  | 19 |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Penatausahaan Keuangan SKPD | Sumatera Barat | Terpenuhinya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD | 100% |  89.464.500  | 21 |   |   |   |   |   |   |   |
| ***V*** | ***Program Perncanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian***  |   |   |   |  **45.142.000**  | ***V*** |  |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Penyusunan Perencanaan dan penganggaran SKPD | Sumatera Barat | Terpenuhinya perencanaan kegiatan SKPD | 100% |  14.338.000  | 23 |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Penelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD | Sumatera Barat | Terpenuhinya kegiatan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD | 100% |  30.804.000  | 24 |   |   |   |   |   |   |
| ***VI*** | ***Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*** | **Peringkat produktifitas pemberitaan Provinsi Sumatera Barat** | ***12*** |  **7.875.096.400**  | ***VII*** |  |  |  |  |   |   |   |
| 24 | Liputan Kegiatan pemerintah daerah | Pemkab/Pemko dan Prov lainnya | Jumlah Pers-release hasil liputan,  | 100% |  2.030.733.200  | 29 |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak | Kab/kota se Sumbar dan pusat | Tersebarnya informai pemabnguan melalui media cetak,  | 100% |  1.151.037.400  | 30 |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Elektronik | Kab/kota se Sumbar dan pusat | Terlaksananya Dialog Interaktif melalui media Eletronik,  | 100% |  1.693.410.900  | 31 |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Penyebarluasan informasi pembangunan melalui media Lluar/ruang | Sumbar | Jumlah sarana penyebarluasan pembangunan melalui media luar ruang,  | 100% |  1.366.600.000  | 32 |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Penyaringan Informsi dan penghimpunan pemberitaan Media massa  | Sumbar | Jumlah Kliping Harian dan analisas Headline pada media cetak | 100% |  240.347.800  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Koordinasi Kehumasan | Sumbar | Terselenggaranya koordinasi bakohumas prov dan Kab/ko | 100% |  294.291.500  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan | Pemkab/Pemko se Sumbar | Jumlah buku Visual Pembanguna Prov. Sumbar | 100% |  904.021.600  | 33 |   |   |   |   |   |   |
| 30 | Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah | Pemkab/Pemko se Sumbar | Jumlah flim doukomenter Daerah dan kegiatan pimpinan  | 100% |  194.654.000  | 35 |   |   |   |   |   |   |
| ***TOTAL*** |  **9.958.005.600**  |   |   |   |   |   |   |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Padang, Juni 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KEPALA BIRO HUMAS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Drs.JASMAN. MM** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pembina TK.I |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NIP. 19680101 198809 1 001 |

|  |
| --- |
| **Tabel T.VI.C.VIII** |
| **Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018** |
| **Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD** |
| **OPD : BIRO HUMAS SETDA PROV. SUMATERA BARAT** |  |  |  |  |
| **No.** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Kebutuhan Dana** | **Sumber Dana** | **Catatan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| ***I*** | ***Program Pelayanan adminstrasi Perkantoran*** |  |  |  | **1.181.472.800** |  |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Biro Humas | Tersedianya kebutuhan administrasi surat-menyurat untuk kepentingan dinas | 100% | 13.000.000 | APBD |  |
| 2 | Penydiaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik | **Biro Humas** | Terselenggaranya jasa telepon,banwith,astinet,radio link SKPD | 100% | 138.000.000 | APBD |  |
| 3 | Penyedian jasa Jamina Barang Milik daerah | **Biro Humas** | Terpeliharanya kenderaan dinas operasional | 100% | 18.100.000 | APBD |  |
| 4 | PenyedianAlat Tulis Kantor | Biro Humas | Terpenuhnya kebutuhan alat tulis perkantoran | 100% | 19.961.800 | APBD |  |
| 5 | PenyedianBarang cetak dan pengandaan | Biro Humas | Terpenuhnya kebutuhan barang cetak dan pengandaan | 100% | 37.601.000 | APBD |  |
| 6 | PenyedianBarang bacaan dan pertauran dan perundang-undangan | Biro Humas | Tesedianya bahan bacaan dan peraturan perundanagn | 100% | 321.789.000 | APBD |  |
| 7 | Penyedian Makanan dan Minuman | Biro Humas | Terpenuhnya kebutuhan pendukung penyelenggaraan rapar-rapat | 100% | 49.920.000 | APBD |  |
| 8 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Kedalam | Dalam/Luar Prov | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan kosultasi dalam dan luar daerah | 100% | 467.966.000 | APBD |  |
| 9 | Penyedian Jasa Informasi dan Dokumentasi da Publikasi | Biro Humas | Meningklatny a Jasa Dokumentasi danPublikasi | 100% | 115.135.000 | APBD |  |
| ***II*** | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur*** |  | **Persetase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur** |  | **630.929.950** |  |  |
| 10 | Pengadaan Mebeluer | Biro Humas | Tersedinya sarana dan prasaran perlengkapan kantor |  | 32.500.000 |  |  |
| 11 | Pengadaan alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi | Biro Humas | Meningkatnya sarana dan Prasana perlengkapan kantor | 100% | 170.000.000 | APBD |  |
| 12 | Pengadaan Jaringan Komputerisasi dan Jaringan Komputerisasi | Biro Humas | terlaksananya sarana dan prasarana | 100% | 79.000.000 | APBD |  |
| 13 | Pengadaan Peralatan rumah tangga | Biro Humas | Tersedianya sarana dan prasana rumah tangga |  | 13.500.000 |  |  |
| 14 | Pemeliharaan Rutin berkala perlengkapan kantor | Biro Humas | Terpeleiharanya perlengkapan kantor | 100% | 25.850.000 | APBD |  |
| 15 | Pemelihaaraan Ruti/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional | Biro Humas | Terpeliharanya kendraan Mobil Dinas /Operasional | 100% | 80.907.500 | APBD |  |
| 16 | Pemiliharaan Rutin/Berkala Jaringan | Biro Humas | Terpeliharanya Instalasi Jaringan | 100% | 35.000.000 | APBD |  |
| 17 | *Penguatan Media Center Pemerintah Prov.Sumbar (baru)* | *Biro Humas* | *Terfalitasinya mayaakat maupaun kalang pemerintah Kab/ko* | ***100%*** | ***194.172.450*** | APBD |  |
| ***III*** | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur*** |  |  |  | **120.618.450** |  |  |
| 18 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan | Dalam/Luar Prov | Meningkatnya sKulaitas sumberdaya Apaartur | 100% | 84.866.000 | APBD |  |
| 19 | *Bimtek Jurnalistik (baru)* | *Sumbar* | ***Terlaksanaya Bimtek Jurnalistik*** | ***100%*** | ***35.752.450*** | APBD |  |
| ***IV*** | ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*** |  | ***Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit SKPD*** |  | **104.746.000** |  |  |
| 20 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Biro Humas | Terpenuhnya laporan kegiatan SKPD | 100% | 15.281.500 | APBD |  |
| 21 | Penatausahaan Keuangan | Biro Humas | Terpenuhnya kegiatan penatausahan Keuangan | 100% | 89.464.500 | APBD |  |
| ***V*** | ***Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian*** |  |  |  | **45.142.000** |  |  |
| ***22*** | Penyusunan perencanan dan Penganggaran SKPD |  |  |  | 14.338.000 |  |  |
| 23 | Pengelolaan, pengawasandan pengendaklian aset SKPD | Biro Humas | Terpenuhnya perencanaan Kegiataan SKPD | 100% | 30.804.000 | APBD |  |
| ***VII*** | ***Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*** |  | ***Peringkat produktifitas pemberitaan Provinsi Sumatera Barat*** |  | **7.875.096.400** |  |  |
| 24 | Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah | Pemprov.Sumbar Kab/Kota | Jumlah Pers-release hasil liputan dan suksesnya HPN 2018 | 100% | 2.030.733.200 | APBD |  |
| 25 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak | Pemprov.Sumbar Kab/Kota | Tersebarnya informasi pembangunan melalui media cetak , terselenggaran HPN 2018 | 100% | 1.151.037.400 | APBD |  |
| *26* | Penyebarluasan Informasi pembangunan melalui media elektronik | Pemprov.Sumbar Kab/Kota | terlaksananya dialog interaktif melalui media elektronik, terselenggaran HPN 2018 | 100% | 1.693.410.900 | APBD |  |
| 27 | Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui media luar ruang | Pemprov.Sumbar Kab/Kota | jumlah sarana penyebarluasan pembangunan melalui medai ruang, terselenggaran HPN 2018 | 100% | 1.366.600.000 | APBD |  |
| 28 | Penyaringan Informasi dan penghimpunana pemberitaan Media massa | Pemerintah Kab/Kota se Sumbar | Jumlah kliping harian dan analisis Headline pada media cetak | 100% | 240.347.800 | APBD |  |
| 29 | Koordinasi kehumasan | Dalam dan luar Prov Sumabar | Terselenggaranya koordinasi kehumasan |  | 294.291.500 |  |  |
| 30 | Laporan Khusus Visualisasi Pembangunan | Pemprov.Sumbar Kab/Kota | Jumlah buku visualisasi Pemabnguan Prov. Sumbar, terselenggaran HPN 2018 | 100% | 904.021.600 | APBD |  |
| 31 | Pembuatan Film Dokumenter Potensi Daerah | Pemprov.Sumbar Kab/Kota | Jumlah flim dokumenterDaerah dan kegiatan pimpinan | 100% | 194.654.000 | APBD |  |
|  | T O T A L |  |  |  | **9.958.005.600** |  |  |
|  |  |  |  |  | Padang, Juni 2017 |
|  |  |  |  |  | KEPALA BIRO HUMAS |
|  |  |  |  | **Drs. JASMAN,MM**Pembina TK.I NIP. 19680101 198809 1 001 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**II.5 PENELAAHAN USULAN DAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT**

**II.5.1 PERINGATAN HARI PERS NASIONAL**

Pada acara Pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Dewan Kehormatan Provinsi PWI Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung pada Januari 2017 di Auditorium Gubernuran, **Hendranof Firdaus, Ketua PWI Sumbar periode 2016-2021, mengutarakan kepada Gubernur Sumatera Barat, Ketua Umum PWI Pusat Margiono, dan Kepala Biro Humas agar Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2018 dapat diselenggarakan di Provinsi Sumatera Barat.**Permintaan Heranof Firdaus tersebut didukung penuh oleh Gubernur Sumatera Barat.

Pada kesempatan yang sama, menjawab permintaan Ketua PWI Sumbar yang didukung oleh Gubernur, **Ketua PWI Pusat Margiono mengonfirmasi kepastian penyelenggaraan Peringatan HPN 2018 akan dilangsungkan di Provinsi Sumatera Barat.**

Menilik sejarah ke belakang, Hari Pers Nasional sendiri awalnya merupakan cetusan kehendak masyarakat pers untuk menetapkan satu hari yang bersejarah guna memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional saat berlangsungnya Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-28 di Padang Sumatera Barat (1978).

Kehendak tersebut diusulkan kepada pemerintah melalui Dewan Pers untuk menetapkan Hari Pers Nasional (HPN). Dalam sidang Dewan Pers ke-21 di Bandung pada tanggal 19 Februari 1981, kehendak tersebut disetujui oleh Dewan Pers untuk disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan Hari Pers Nasional.

Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI, ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia.

Penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah khususnya pemerintah daerah yang menjadi tempat penyelenggaraan.Kebijakan ini diputuskan dalam sidang Dewan Pers ke-26 di Ambon pada 11-13 Oktober 1985.Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk menyemarakkan Hari Pers Nasional. Antara lain Pameran Pers dan Media yang diikuti oleh seluruh komponen pers nasional, media, serta pendukung lainnya. Selain itu diselenggarakan Konvensi Nasional Media Massa, penyerahan Anugerah Jurnalistik dan Pers, Bakti Sosial, dan hiburan rakyat.

Hari Pers Nasional menjadi ajang silahturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan pers khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.Kegiatan ini merupakan agenda tahunan terbesar dan paling bergengsi bagi komponen pers Indonesia.Landasan ideal HPN ialah sinergi.Sinergi antar komponen pers, antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah.

Penyelenggaraan HPN pada dasarnya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Humas mengingat Biro Humas Sekretariat Daerah merupakan SKPD yang bertanggungjawab memastikan terjalinnya hubungan harmonis yang sinergis antara pemerintah daerah dengan pers.

**Tabel.T-VI.C.9a**

**Usulan Program dan Kegiatan (BARU) dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018**

**Provinsi Sumatera Barat**

Nama OPD: Biro Humas Sekretariat Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **BESARAN/ VOLUME** | **CATATAN** |
| 1 | Penyelenggaraan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 | Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya HPN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 | 1 paket | Menjadi Tuan Rumah HPN merupakan hal bergengsi yang diperebutkan oleh seluruh Provinsi di Indonesia |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

**III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam RPJMN Tahun 2016-2021, tertuang sembilan agenda pokok untuk mewujudkan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sembilan agenda pokok yang diberi nama Nawa Cita tersebut, sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. **Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;**
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita poin ke-2 ‘Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya’ ditempuh dengan; melakukan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi yang dimantapkan dan ditingkatkan melalui: Perbaikan Birokrasi, Restrukturisasi Kelembagaan, Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perbaikan kualitas pelayanan publik, Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Penerapan *e-Government* dan *Open Government*, dan Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memperlihatkan bentuk nyata komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu perintis Gerakan Global *Open Government Partnership* (OGP) dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Pemerintahan bagi publik.

Dua dari tujuh jalan yang ditempuh untuk memperbaiki tata kelola dan reformasi birokrasi yakni, *e-Government* dan *Open Government*, merupakan konsep-konsep kunci yang terus didorong penerapannya untuk mewujudkan infrastruktut kelembagaan yang kuat untuk mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan publik yang mumpuni. Dua konsep ini erat kaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas sebagai SKPD yang bertugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan, dan evaluasi hubungan masyarakat.

**III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Rencana Kerja SKPD (Renja) SKPD dibuat dalam rangka penyusunan Dokumen Recana Keja Pemerintah Daerah ( RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun,

Adapun tujuan Rencana Kerja Biro Humas tahun 2018 adalah untuk meggambarkan perencanaan kerangka indikatif pendanaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Humas dengan terlebih dahulu menyusun menetapkan indikator-indikator kinerja yang didasarkan pada tugas dan fungsi dari Biro Humas yang ingin dicapai dalam periode satu tahun.

Adapun sasaran Renja SKPD adalah dalam rangka mewujudkan visi,misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang dituangkan kedalam sasaran renja Biro Humas, mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Biro Humas yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD)

Rencana Startegis 2016-2021 (Renstra) Biro Humas mengacu pada pre kondisi global, nasional dan lokal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Biro Humas menyusun Renstra Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan Biro Humas.

Renstra Biro Humas ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehumasan dan Komunikasi & Informatika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Humas yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021,Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2021, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta *trend* komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021, visi Gubernur Sumatera Barat yang ingin diwujudkan adalah:

**“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Visi Gubernur Sumatera Barat ini akan diwujudkan dengan memenuhi 5 (lima) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi kedua,‘Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional’, dalam pemenuhan idealnya ditujukan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntabel dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ini akan diwujudkan dengan penerapan sejumlah Strategi antara lain :

1. Melanjutkan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum;
3. Meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM pengadaan barang dan jasa,
5. Meningkatkan kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa,
6. Meningkatkan Penerapan sistem *whistleblowing*,
7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,
8. Meningkatkan penyelenggaraan *e-Government*,
9. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat,
10. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Dua dari sepuluh Strategi di atas Poin 8 dan 9- sepenuhnya akan diupayakan oleh Biro Humas. Untuk itu, Biro Humas merumuskan Arah Kebijakan yang akan diambil demi memastikan peningkatan yang diharapkan guna mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional sebagaimana dicita-citakan pada Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien;
2. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

**III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk Tahun Anggaran 2018, dan dengan menimbang akan diselenggarakannya Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Provinsi Sumatera Barat, Biro Humas Sekretariat Daerah merumuskan 6 (enam) program yang mencakup 28 kegiatan dimana kegiatan untuk menyukseskan Peringatan HPN Sumbar 2018 disisipkan ke dalam program/kegiatan yang telah ada. Program tersebut antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Aset
6. Program Penyebaluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan jasa surat-menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
9. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi, dan publikasi

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yakni:

1. Pengadaan meubeler
2. Pengadaan computer
3. Pengadaan alat studio
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusiaakan diejawantahkan melalui kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegaitan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**Program Perencanaanm Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Aset**

Program Perencanaan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Aset terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD
2. Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD

**Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Program ini ditetapkan sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XXII Pasal 391-395, dan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publikyang secara umum mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan sebanyak mungkin informasi pemerintah kepada lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat melalui seluruh media internal pemerintah dan seluruh kanal informasi publik.

Namun, dengan diterbitkannya Permenkominfo 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Biro Humas membatasi pelaksanaan program ini hanya pada kegiatan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan Demikian, tumpang-tindih program/kegiatan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dapat dihindari.

Dalam prosesnya, terdapat empat tahap yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas penyebarluasan informasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerahdi atas, yakni; penghimpunan informasi, pengolahan materi publikasi, penyebarluasan informasi melalui kanal-kanal informasi publik, dan *monitoring* respon/opini atas informasi yang disebarluaskan. Atas dasar empat tahap penyebarluasan informasi ini, dirumuskan kegiatan-kegiatan pada Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan, sebagai berikut:

* Dalam rangka penghimpunan dan pengolahan materi publikasi:
1. Liputan kegiatan Kepala Daerah
2. Pembuatan film dokumenter pembangunan daerah
* Dalam rangka penyebarluasan:
1. Publikasi penyelenggaraan pemerintahan dan melalui media cetak
2. Publikasi penyelenggaraan pemerintahan melalui media elektronik
3. Publikasi penyelenggaraan pemerintahan melalui media luar ruang
4. Laporan visualisasi pembangunan
* Dalam rangka monitoring/evaluasi
1. Koordinasi kehumasan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Analisa pemberitaan

Adapun 10 (sepuluh) kegiatan yang akan dilakukan untuk menjamin tercapainya target program ini, yakni:

1. Liputan kegiatan Pemerintah Daerah
2. Koordinasi Kehumasan
3. Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak
4. Penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik
5. Penyaringan informasi dan penghimpunan pemberitaan media massa
6. Pembuatan film dokumenter
7. Laporan khusus visualisasi pembangunan
8. Penguatan media center
9. Bimtek jurnalistik
10. Penyebaran informasi pembangunan melalui media luar ruang

**Tabel.T-VI.C.9**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018**

**Provinsi Sumatera Barat**

BIRO HUMAS SETDA PROV.SUMATERA BARAT

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | **PROGRAM/KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN** | **Besaran/Volume** | **KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF** | **Catatan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **PAGU INDIKATIF PROGRAM URUSAN**  | **8.819.887.300** |  |
| **I** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur** |  | Meningkatnya SDM Aparatur | 100 % | **120.618.450** |  |
| 1 | Bimbigan Teknis Implementasi Peraturan per Undang-undangan |  | Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur | 100 % | 84.866.000 |  |
| 2 | Bimtek jurnalistik | Kota Padang | Persentase Meningkatnya jumlah jurnalis yang handal (100%) | 45 org | 35.752.450 |  |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  | **Meningkatnya Sarana sarana Aparatur** | **1 paket** | **194.172.450** |  |
| 3 | Penguatan Media Center | Kota Padang | -Tersedianya Media Center yang representative-Tingkat kepuasan pengguna media ceter (100 %) | 1 paket | 194.172.450 |  |
| **III** | **Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** |  | **Persentase Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah** | **60 %** | **7.875.096.400** |  |
| 4 | Koordinasi kehumasan | Provinsi Sumatera Barat | Meningkatkan kualitas koordinasi kehumasan daerah (100 %) | 2 kali | 294.291.500 |  |
| 5 | Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak | Kab/Kota se-Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat | Persentase Publikasi Informasi Pembangunan melalui media cetak (100%) | 182 data | 1.151.037.400 |  |
| 6 | Penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik | Provinsi Sumatera Barat | Persentase publikasi informasi pembangunan melalui media elektronik(100%) | 52 kali dialog interaktif  | 1.693.410.900 |  |
| 7 | Penyebaran informasi pembangunan melalui media luar ruang | Provinsi Sumatera Barat | Persentase publikasi informasi kegiatan kepala dearah melalui media luar ruang: (100%) | 800 spanduk, 60 baliho, 5000 poster, 1650 kalender, 5 konstruksi baliho, 1 videotron, 1 kios agenda pimpinan | 1.366.600.000 |  |
| 8 | Penyaringan informasi dan penghimpunan pemberitaan media massa | Provinsi Sumatera Barat | Jumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan analisa pemberitaan  | 1825 kliping, 1300 headline analisa | 240.347.800 |  |
| 9 | Liputan kegiatan Pemerintah Daerah | Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya | Persentase Liputan kegiatan pemerintah daerah(100%) | 300 press realise, 60000 pemberitaan5 paket | 2.030.733.200 | Dalam rangka peringatan HPN Sumbar 2018 |
|  |  | -Terselenggaranya kegiatan penunjang HPN Sumbar 2018:  |
| 10 | Laporan khusus visualisasi pembangunan | Provinsi Sumatera Barat | -Meningkatkan informasi hasil pembangunan melalui buku visualisasi(100%) | 100 exp2000 exp,300 umbul-umbul, 50 spanduk, 31 baliho, 200 cindera mata | 904.021.600 | Dalam rangka peringatan HPN Sumbar 2018 |
|  |  | -Terselenggaranya kegiatan penunjang HPN Sumbar 2018:  |
| 11 | Pembuatan film dokumenter | Provinsi Sumatera Barat | Persentase informasi pembangunan melalui penayangan film documenter(100%) | 3 paket dokumen film | 194.654.000 |  |
| 12 | Penyusunan Kebijakan Komunikas,Informasi,Persandian dan Hubungan Masyarakat | Provinsi Sumatera Barat | Jumlah Kebijakan Pemprov dan Kabupaten Kota yang diantau dan dievaluasi ( 19 kab/Ko) | 70 % | 108.685.000 |  |
|  | **JUMLAH**  | **8.819.887.300** |  |

**Tabel.T-VI.C.10 *(oke)***

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018**

**Dan Prakiraan Maju Tahun 2019**

**Provinsi Sumatera Barat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE** | **URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN** | **RENCANA TAHUN 2018** | **CATATAN PENTING** | **PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019** |
| **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** | **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **TOTAL PAGU INDIKATIF** | **10.310.933.000** |  |  |  | **5.924.322.000** |
|  |  |  |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  | **100%** | **1.181.472.800** |  |  | **100%** | **1.349.322.000** |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya kebutuhan administrasi kantor surat-menyurat untuk kepentingan dinas selama 12 bulan | Kota Padang | 100% | 13.000.000 | APBD |  | 100% | 15.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | Tersedianya jasa telepon, bandwith, astinet, dan radio link | Kota Padang | 100% | 138.000.000 | APBD |  | 100% | 150.000.000 |
|  |  |  |  | Penyedian Alat Tulis kantor | Terpenuhnya kebutuhan alat tulis kantor | Kota padang  | 100% | 19.961.800 | APBD |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah | Terpenuhinya premi asuransi 3 (unit) kendaraan dinas operasional | Kota Padang | 100% | 18.100.000 | APBD |  | 100% | 20.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk perkantoran selama 12 bulan | Kota Padang | 100% | 37.601.000 | APBD |  | 100% | 40.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan rumah tangga | Terpenuhinya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran | Kota Padang | 100% | 13.500.000 | APBD |  | 100% | 14.850.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kota Padang | 100% | 321.798.000 | APBD |  | 100% | 434.472.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Terpenuhinya kebutuhan konsumsi kegiatan rapat selama 12 bulan | Kota Padang | 100% | 49.920.000 | APBD |  | 100% | 55.000.000 |
|  |  |  |  | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan | Provinsi Sumatera Barat dan luar provinsi | 100% | 467.966.000 | APBD |  | 100% | 500.000.000 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa informasi, dokumentasi, publikasi | Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dalam bentuk foto: 5769 foto ukuran 4R, 720 foto ukuran 10R untuk 3 display-box, 36 album dokumentasi | Provinsi Sumatera Barat | 100% | 115.135.000 | APBD |  | 100% | 120.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |  |  |  | **835.431.800** |  |  | **100%** | **705.000.000** |
|  |  |  |  | Pengadaan meubeler | Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor: 1 lemari/brankas, 3 lemari arsip, 6 filing cabinet | Kota Padang | 100% | 32.500.000 | APBD |  | 100% | 40.000.000 |
|  |  |  |  | Pengadaan computer | Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor: 4 PC, 2 notebook, 5 printer | Kota Padang | 100% | 79.000.000 | APBD |  | 100% | 80.000.000 |
|  |  |  |  | Pengadaan alat studio | Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan kantor: 2 unit drone | Kota Padang | 100% | 170.000.000 | APBD |  | 100% | 200.000.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor | Terpelihara alat kantor: 8 unit camera, 2 unit video, pembelian 1 suku cadang camera, 4 mesin tik, 7 unit AC, 7 unit laptop, 10 unit PC, 9 unit printer | Kota Padang | 100% | 25.850.000 | APBD |  | 100% | 50.000.000 |
|  |  |  |  | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan jaringan | Terpeliharanya infrastruktur jaringan LAN/internet Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat | Kota Padang | 100% | 35.000.000 | APBD |  | 100% | 40.000.000- |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan /Operasial | Terpeliharanya Mobil Dinas/Operasional | Kota padang | 100% | 80.907.500 | APBD |  | 100% | 95.000.000 |
|  |  |  |  | Penguatan Media Center | Tersedianya Media Center yang representatif | Kota Padang | 100% | 194.172.450 | APBD |  | 100 % | 200.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia** |  |  | **100%** | **120.618.450** |  |  | **100%** | **133.000.000** |
|  |  |  |  | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Terselenggaranya pengembangan SDM Humas melalui 4 kali bimtek dalam/luar | Provinsi Sumatera Barat dan luar provinsi | 100% | 84.866.000 | APBD |  | 100% | 90.000.000 |
|  |  |  |  | Bimtek jurnalistik | Terselenggaranya pengembangan wawasan jurnalistik SDM Humas  | Kota Padang | 100% | 35.752.450 | APBD |  | 100% | 43.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Meningkatnya laporan Capaian Kinerja OPD** |  | **100%** | **104.746.000** |  |  | **100%** | **116.000.000** |
|  |  |  |  | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Terpenuhinya laporan kegiatan SKPD | Kota Padang | 100% | 15.300.000 | APBD |  | 100% | 17.000.000 |
|  |  |  |  | Penatausahan Keuangan SKPD | Terpenuhnya kegaiatn penatausahan keuangan | Kota padang  | 100% | 89.700.000 | APBD |  | 100% | 99.000.000 |
|  |  |  |  | **Program Perencanaan Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kegiatan dan Aset** | **Meningkatnya Penataan Program kerja dan Kegiatan OPD sesuai Aturan**  |  | **100%** | **45.142.000** |  |  | **100%** | **51.000.000** |
|  |  |  |  | Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD | Terpenuhinya perencanaan kegiatan SKPD: Renstra, Renja, RKA, DPPA-Pergeseran, DPPA-Perubahan | Kota Padang | 100% | 14.338.000 | APBD |  | 100% | 16.000.000 |
|  |  |  |  | Pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD | Terlaksananya kegiatan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD | Kota Padang | 100% | 30.804.000 | APBD |  | 100% | 35.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** | **Peringkat Produktifitas Pemberitaan Pemerintah Provinsi sumatera Barat**  |  | **12** | **8.069.268.850** |  |  | **10** | **3.570.000.000** |
|  |  |  |  | Koordinasi kehumasan | Terselenggaranya 2 kali pertemuan Bakohumas | Provinsi Sumatera Barat | 100% | 294.291.500 | APBD |  | 100% | 350.000.000 |
|  |  |  |  | Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak | Publikasi 182 informasi pembangunan Prov. Sumbar melalui media cetak | Kab/Kota se-Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat | 100% | 1.151.037.400 | APBD |  | 100% | 850.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik | Terlaksananya dialog interaktif: 52 kali siaran langsung (TVRI Nasional, TVRI Sumbar, dan TV Lokal), 34 kali siaran tundaTerselenggaranya Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2018 | Provinsi Sumatera Barat | 100% | 1.693.410.900 | APBD |  | 100% | 500.000.000 |
|  |  |  |  | Penyebaran informasi pembangunan melalui media luar ruang | Tersebarnya informasi pembangunan melalui media luar ruang: 800 meter spanduk, 60 baliho, 5000 poster, 1650 kalender,Terpeliharanya 4 konstruksi baliho,Pembangunan 5 konstruksi baliho,Pembangunan 1 videotron,Pengadaan 1 Kiosk Agenda Pimpinan. | Provinsi Sumatera Barat | 100% | 1.366.600.000 | APBD |  | 100% | 380.000.000 |
|  |  |  |  | Penyaringan informasi dan penghimpunan pemberitaan media massa | Terhimpunnya pemberitaan terkait Pemprov Sumbar: 1825 kliping, 1300 headline analisa | Provinsi Sumatera Barat | 100% | 240.347.800 | APBD |  | 100% | 250.000.000 |
|  |  |  |  | Liputan kegiatan Pemerintah Daerah | 300 press-release hasil liputan, 60000 pemberitaan Pemprov Sumbar | Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya | 100% | 2.115.220.650 | APBD |  | 100% | 850.000.000 |
|  |  |  |  | Terselenggaranya kegiatan penunjang HPN Sumbar 2018: City-Tour wartawan HPN, buku wartawan HPN, Souvenir wartawan HPN, sertifikasi wartawan HPN | *Dalam rangka peringatan HPN Sumbar 2018* |
|  |  |  |  | Laporan khusus visualisasi pembangunan | 1 Judul buku Visualisasi Pembangunan Sumbar sebanyak 100 eksemplar | Provinsi Sumatera Barat | 100% | 904.021.600 | APBD |  | 100% | 130.000.000 |
|  |  |  |  | Terselenggaranya kegiatan penunjang HPN Sumbar 2018: Buku pandu HPN 2000 eksemplar, 300 umbul-umbul HPN, 50 spanduk HPN, 31 baliho HPN, 200 cinderamata HPN bagi tamu VIP | *Dalam rangka peringatan HPN Sumbar 2018* |
|  |  |  |  | Pembuatan film dokumenter | 3 paket film dokumenter potensi daerah, 24 dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dalam bentuk CD audio-visual | Provinsi Sumatera Barat | 100% | 194.654.000 | APBD |  | 100% | 200.000.000 |
|  |  |  |  | *Penyusunan Kebijakan Komunikas,Informasi,Persandian dan Hubungan Masyarakat* | *Jumlah Kebijakan Pemprov dan Kabupaten Kota yang diantau dan dievaluasi ( 19 kab/Ko)* |  | 70 | 108.685.000 | APBD |  | 75 | 110.000.000 |
|  |  |  |  |  | **Jumlah** |  |  | **10.310.933.000** |  |  |  | **5.924.322.000** |

Padang, Juni 2017

**KEPALA BIRO HUMAS**

**Drs. JASMAN, MM,**

Pembina TK.I NIP. 19680101 198809 1 001

**BAB IV**

**PENUTUP**

Untuk mencapai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tujuan dan saran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas Sumberdaya Manusia, sarana dan prasarana. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh kareana itu Dokumen RENJA Biro Humas merupakan faktor pendukung pencapaian kinerja yang keberhasilanya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumberdaya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menetukan tehadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga maka perlu kesejahteraan dan pengembangan karier. Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembanguan, RENJA ini menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Pendekatan rasionalisasi akan terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Humas pada Tahun Anggaran 2018 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani dalam menetapkan plafon anggaran Tahun 2018 karena pada dasarnya anggaran berbasiskan kinerja merupakan ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi untuk mencapai predikat Sumatera Barat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian Renja ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi semua pihak terkait.

Padang, Juni 2017

KEPALA BIRO HUMAS

**Drs. JASMAN, MM,**

Pembina Tk.I

NIP. 19680101 198809 1 001